

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan sektor yang sangat penting terhadap perkembangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan adanya sektor UKM, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Sektor UKM pun telah terbukti menjadi pilar perekonomian yang tangguh. Terbukti saat terjadi krisis ekonomi 1998, hanya sektor UKM yang bertahan dari *collapse*-nya perekonomian (Bambang P.S Brodjonegoro, 2015). UKM terbukti bertahan akan krisis dan dapat survive dikarenakan pertama, tidak memiliki utang luar negeri, kedua, tidak terlalu banyak utang ke perbankan dikarenakan mereka banyak dianggap tidak layak memperoleh bantuan kredit atau dana (*unbankable*), ketiga, mereka menggunakan input dalam negeri dan yang keempat, berorientasi atau berkencenderungan untuk ekspor (Mudradjad Kuncoro, 2008). Jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah berdasarkan data yang dimiliki oleh Kementrian Koperasi dan UMKM di Indonesia, sebanyak 57,89 juta unit atau 99,99% dari jumlah total pelaku usaha nasional. Dengan kontribusi sebesar 96,99% terhadap kesempatan pekerjaan dan terhadap pembentukan Produk Domestic Regional Bruto sebanyak 60.34%.

Pada tahun 2014 berdasarkan data Badan Pusat Statistika Provisi Jawa Timur pengemukakan bahwa pertumbuhan produksi UKM di Jawa Timur pada Triwulan IV terjadi kenaikan sebesar 2,66% jika dibandingkan dengan Triwulan

III. Rata-rata perkembangan UKM di Jawa Timur sebesar 54,34% per tahun dan menyerap sebanyak 98% tenaga kerja. Jika pemberantasan kemiskinan menjadi alasan utama bagi setiap kebijakan pembangunan, maka UKM dapat diyakini menjadi solusi utama sebagai pendukung perekonomian rakyat sebagai peningkatan penghasilan masyarakat miskin dan upaya penyediaan lapangan pekerjaan(Prasetyo, 1998, 2007). Data Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 menyatakan bahwa perkembangan unit usaha menunjukkan trend yang positif, hingga Triwulan I Tahun 2015 jumlah unit usaha meningkat sebanyak 0,50% dari tahun 2014 dengan jumlah tenaga kerja yang dapat diserap sebanyak 3.134.809 orang. Berikut data perkembangan UMKM di Jawa Timur Periode 2012 - 2015 :

Tabel 1.1
Perkembangan UMKM di Jawa Timur Periode 2013 – 2015

Uraian	2013	2014	Triwulan I 2015
Industri Kecil	785.906	789.837	789.957
Industri Menengah	16.484	16.566	16.863
Industri Besar	1.064	1.075	1.083
Jumlah Unit Usaha (Unit)	803.454	807.478	807.903
Industri Kecil	1.806.045	1.815.076	1.815.574
Industri Menengah	951.666	956.424	956.888
Industri Besar	357.970	361.549	362.347
Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	3.115.681	3.133.049	3.134.809

Berdasarkan hal tersebut sektor UKM membuktikan memiliki peranan strategis bagi perekonomian di Jawa Timur. Perkembangan sektor UKM di Provinsi Jawa Timur tidak lepas dari dukungan oleh peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dari segala aspek usaha, Kabupaten Gresik merupakan salah satu kota industri di Provinsi Jawa Timur, peran industri di Kabupaten Gresik didukung dari usaha besar, menengah, kecil sampai mikro. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik Tahun 2014 menyebutkan jumlah unit usaha kecil dan mikro yang terbagi di 18 kecamatan dan 330 desa sebanyak 12.544 unit. Data Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Gresik Tahun 2014 menyebutkan jumlah usaha mikro sebanyak 140.732 unit, Usaha Kecil sebanyak 17.508 unit dan Usaha Menengah 1.184 unit. Dengan total 159.424 unit. Secara lebih rinci dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Jumlah UMKM Kabupaten Gresik Tahun 2014

No	Nama Kecamatan	Jumlah Usaha Mikro	Jumlah Usaha Kecil	Jumlah Usaha Menengah	Jumlah
1	Kec. Wringinanom	876	943	65	1884
2	Kec. Driyorejo	8133	515	53	8701
3	Kec. Kedamean	10486	676	25	11187
4	Kec. Menganti	12087	8790	432	21309
5	Kec. Cerme	11099	419	33	11551
6	Kec. Benjeng	7675	327	53	8055
7	Kec. Balongpanggang	11941	348	18	12307
8	Kec. Duduk Sampeyan	7408	466	17	7891
9	Kec. Kebomas	9572	744	87	10403
10	Kec. Gresik	6223	1182	143	7548
11	Kec. Manyar	8769	793	136	9698
12	Kec. Bungah	6825	365	24	7214
13	Kec. Sidayu	6455	396	27	6878
14	Kec. Dukun	6846	683	29	7558
15	Kec. Panceng	6770	181	17	6968
16	Kec. Ujungpangkah	6019	208	10	6237
17	Kec. Sangkapura	8612	310	13	8935
18	Kec. Tambak	4936	162	2	5100
	Total	140.732	17.508	1.184	159.424

Hal tersebut membuktikan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam perkembangan industri di Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik mempunyai UMKM unggulan yaitu industri batik tulis, bordir dan konveksi, kemasan atau perhiasan imitasi, rotan, rebana, tenun menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), kopyah, anyaman bambu dan jajanan khas. Industri unggulan prioritas yaitu industri tenun ATBM, kopyah, dan anyaman bambu. Selain UMKM yang menjadi industri unggulan, ada UMKM yang menjadi klaster industri Tahun 2014 sesuai dengan Keputusan Bupati Gresik Nomor 500/865/HK/437.12/2014 yaitu sentra Jajanan Khas Kabupaten Gresik di Kelurahan Lumpur, kerajinan rebana dan songkok di Desa Bungah, pusat makanan ringan di Desa Morowudi, kerajinan rotan dan pelepah pisang di Desa Putat Lor. Sentra industri dilakukan untuk memudahkan pembinaan dan pengembangan segala aspek usaha secara menyeluruh atas dasar produk yang dihasilkan. Permasalahan umum UMKM di Kabupaten Gresik dapat ditinjau dari berbagai aspek usaha.

Pada aspek keuangan yaitu belum memiliki pencatatan keuangan meski bersifat sederhana. Pada aspek manajemen usaha yaitu tidak memiliki struktur organisasi dan pembagian kerja. Pada aspek pemasaran yaitu produk tidak berdaya saing, belum mempunyai legalitas produk, desain kemasan yang kurang menarik dan cara mempromosikan produk pada konsumen yang kurang efektif. Permasalahan mendasar pemasaran produk UMKM di Kabupaten Gresik yaitu kurangnya kemampuan pelaku UMKM dalam mengakses pasar dan mengkomunikasikan produk pada konsumen, sehingga secara langsung akan

berpengaruh pada tujuan pemasaran yaitu adanya transaksi jual beli dan kepuasan konsumen. Pada aspek sumber daya manusia yaitu masih kekurangan tenaga kerja terampil dan sesuai keahlian. Pada aspek produksi yaitu masih menggunakan alat-alat tradisional dan belum menerapkan Standart Operational Procedure (SOP). Permasalahan mendasar produk UKM di Kabupaten Gresik yaitu kemampuan pelaku UKM dalam menjaga kualitas produk yang akan dinikmati oleh konsumen, sehingga secara langsung akan berpengaruh pada tujuan berwirausaha itu sendiri yaitu untuk memperoleh keuntungan dengan sebanyak-banyaknya serta menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kendala soal tidak terjaganya kualitas produk yang dialami oleh pelaku UKM dikarenakan tidak adanya SOP. Tidak adanya SOP yang mengakibatkan tidak dapat terjaganya kualitas produk dialami oleh salah satu industri pengerajin songkok terbanyak di Kabupaten Gresik yaitu di Kelurahan Kemuteran Kecamatan Gresik.

Tabel 1.3
Data Industri Songkok Kabupaten Gresik Tahun 2012

Data Industri Pengerajin Songkok Sekabupaten Gresik	
Nama Kecamatan	Jumlah Pengerajin
Wringin Anom	0
Driyorejo	0
Kedamean	0
Menganti	0
Cerme	0
Benjeng	5
Balong Panggang	0
Panceng	0
Sangkapura	0
Duduk Sampeyan	1
Kebomas	6
Gresik	192
Manyar	28
Bungah	29
Sidayu	0
Dukun	0
Pangkah	0
Tambak	0

Sumber : Data UKM Diskoperindang Kab.Gresik (2015)

Tabel 1.4
Data Industri Songkok Kecamatan Gresik Tahun 2015

<u>Nama Desa</u>	<u>Jumlah Pengerajin</u>
<u>Ngipik</u>	2
<u>Tlogopatut</u>	0
<u>Sidokumpul</u>	0
<u>Kramat Inggil</u>	0
<u>Sidorukun</u>	0
<u>Pulopancikan</u>	0
<u>Gapurosukolilo</u>	0
<u>Tlogobendung</u>	0
<u>Pekauman</u>	0
<u>Sukorame</u>	0
<u>Karangturi</u>	2
<u>Trate</u>	10
<u>Karangpoh</u>	0
<u>Bedilan</u>	10
<u>Kebungson</u>	0
<u>Pekelingan</u>	5
<u>Kemuteran</u>	115
<u>Sukodono</u>	10
<u>Keroman</u>	15
<u>Lumpur</u>	0
<u>Tlogopojok</u>	0

Sumber : Data UKM Diskoperindang Kab.Gresik (2015)

Berdasarkan hasil dari survei serta wawancara kelokasi industri pengerajin songkok di Kelurahan Kemuteran Kecamatan Gresik, telah didapati suatu masalah dari proses produksi songkok itu sendiri. Berdasarkan kecacatan produk dalam delapan bulan terakhir pada periode juli 2015 hingga februari 2016, menunjukkan rata-rata jumlah kerusakan produksi songkok mencapai 3.29% dari total keseluruhan produksi yang dihasilkan sebanyak 638.400 unit.

Tabel 1.5
Data Kerusakan Produk Songkok

Bulan	Hasil produksi (unit)	Jumlahkerusakan (unit)	Presentase kerusakan
Juli (2016)	81.540	3.200	3,92%
Agustus (2016)	81.360	3.180	3,9%
September (2016)	80.960	3.120	3,8%
Oktober (2016)	77.280	2.200	2,84%
November (2016)	77.440	2.160	2,78%
Desember (2016)	79.840	2.376	2,96%
Januari (2017)	79.980	2.368	2,96%
Februari (2017)	80.000	2.400	3,00%
TOTAL	638.400	21.004	Rata-rata 3,29%

Sumber : data primer yang sudah diolah

Dari data diatas terlihat dari bulan September 2016 – November 2016 angka kecacatan produk mengalami penurunan sedangkan mulai bulan Desember 2016 – Februari 2017 angka kecacatan produk mengalami meningkat seiring dengan kenaikan hasil produksi, semua ini terjadi karena tidak adanya pengendalian mutu secara keseluruhan. Pengendalian mutu yang telah dilakukan oleh pengerajin songkok hanyalah lebih menekankan pada pemilihan bahan bahu yang akan dijadikan songkok. Pada proses produksi songkok ada proses pengukuran bahan,

pemotogan bahan, serta penjahitan bahan. dalam devisi inilah rentan terjadi kesalahan yang bisa menimbulkan produk cacat. Dalam arti kecacatan disini adalah bentuk fisik dari songkok tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pemilik usaha dan akhir produk gagal tersebut tidak bisa diterima atau dijadikan songkok dengan kualitas rendah yang tentu saja harga jual songkok tersebut jauh dibawah harga jual songkok yang semestinya. Padahal didalam berbisnis produsen dituntut untuk menekan angka produk cacat disetiap proses produksinya agar biaya produksi bisa ditekan menjadi lebih rendah dan produsen mendapatkan harga jual yang murah dengan begitu diharapkan pemilik usaha dapat mengambil keuntungan yang maksimal tanpa mengurangi kualitas produk.

Kualitas produk dan jasa, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas perusahaan adalah tiga hal yang terikat erat. Semakin tinggi tingkat kualitas, semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan yang dicapai, yang mendukung harga dapat lebih tinggi dan (sering kali) dengan biaya yang lebih rendah (Kotler dan Keller, 2008;144).Dari paparan permasalahan tersebut dilakukanlah metode PDCA (*Plan-Do-Check-Action*)atau bisa disebut juga dengan metode kaizen.

Kaizen berasal dari bahasa Jepang Kai yang berarti perubahan dan zen yang berarti baik, jadi arti kata dari kaizen ialah perubahan menuju kearah yang lebih baik. Kaizen bisa dikatakan juga sebagai perbaikan yang berkelanjutan. Tjiptono dan Diana (2010;31) menyatakan bahwa W. EdwardsDeming adalah orang yang pertama kali mengajarkan pentingnya pendekatan yang tepat, sistematis, serta pendekatan dengan dasar statistik untuk memecahkan masalah kualitas yaitu Siklus Deming yang terdiri dari *Plan, Do, Check, Action*.

Plan adalah mengadakan riset konsumen dan menggunakannya dalam sebuah perencanaan produk, *Do* adalah memproduksi atau menghasilkan produk, *check* adalah memeriksa produk hasil dari produksi apakah sudah sesuai dengan perencanaan, dan *Action* adalah memasarkan produk tersebut kepada konsumen. Dengan menjalankan pengendalian mutu perusahaan berharap dapat meminimalisir produk gagal atau *defect* produk dan pada akhirnya akan meningkatkan laba perusahaan. Melihat masalah yang telah diutarakan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana mengendalikan produk cacat dalam suatu proses produksi songkok.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas maka peneliti menetapkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Mencari penyebab utama dari dampak yang ditimbulkan atas penerapan pengendalian mutu yang tidak menyeluruh pada industri songkok di Desa Kemuteran Kecamatan Gresik?
2. Bagaimanakah strategi yang tepat dalam pengendalian mutu pada industri songkok di Desa Kemuteran Kecamatan Gresik?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tercantum di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab utama dari dampak yang timbul atas penerapan pengendalian mutu yang tidak menyeluruh pada industri Songkok di Desa Kemuteran Kecamatan Gresik.
2. Untuk mengetahui strategi yang tepat dalam pengendalian mutu pada industri songkok di Desa Kemuteran Kecamatan Gresik.

1.4. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian dapat digunakan sebagai hal – hal berikut :

1. Bagi Perusahaan :

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan adalah untuk mengetahui penerapan quality control atau pengendalian mutu dalam mengurangi produk gagal sehingga jumlah produk gagal di industri Songkok di Kelurahan Kemuteran Kecamatan Gresik dapat ditekan seminimal mungkin dan juga sebagai masukan yang membangun untuk perusahaan.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai penerapan materi yang telah didapat selama proses perkuliahan di universitas. Selain itu, hal ini diharapkan akan menambah wawasan mahasiswa di bidang manufaktur.

3. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian di masa yang akan datang khususnya pengembangan ilmu yang berhubungan dengan pengendalian mutu atau quality control.